



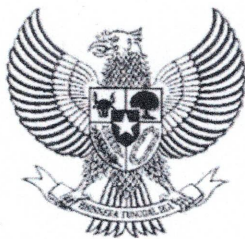
Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran VI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



BKPSDM



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 273 / 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, dengan sistematika terdiri atas:

a. Bab I : Pendahuluan;

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

a. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan; dan

b. Bab IV : Penutup.



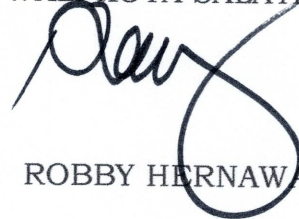
- KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - y. Lampiran XXV : Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - z. Lampiran XXVI : Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - aa. Lampiran XXVII : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - bb. Lampiran XXVIII : Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
 - cc. Lampiran XXIX : Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
 - dd. Lampiran XXX : Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
 - ee. Lampiran XXXI : Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.



- KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 10 Agustus 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISIiii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan4

 1.4 Sistematika Penulisan4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU6

 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan tahun 20256

 2.2 Evaluasi Capaian SPM tahun 2023-2025.....8

 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.....8

 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD.....9

 2.5 Usulan Masyarakat10

 2.6 Inovasi bidang urusan10

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....12

 3.1 Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Salatiga Tahun 202712

 3.2 Arah Kebijakan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027.....13

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH15

 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan15

 4.2 Rencana Kerja untuk Pencapaian program Prioritas Daerah,
 Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional dan Program
 Strategis Nasional20

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN21

BAB VI PENUTUP.....24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Renja BKPSDM) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang disusun sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Renja BKPSDM berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan selama satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi BKPSDM Kota Salatiga.

Penyusunan Renja BKPSDM dilaksanakan melalui proses perencanaan yang sistematis, partisipatif, dan berorientasi pada kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian kinerja perangkat daerah, serta isu-isu strategis dan kebutuhan penyelenggaraan manajemen kepegawaian serta pengembangan kompetensi aparatur. Proses penyusunannya dilakukan secara terintegrasi melalui tahapan perencanaan daerah, termasuk Forum Perangkat Daerah, dengan mengakomodasi masukan dari para pemangku kepentingan.

Renja BKPSDM memiliki keterkaitan yang erat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran teknis RKPD pada tingkat perangkat daerah sehingga program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirumuskan harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sasaran, arah kebijakan, serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Selain itu, Renja BKPSDM juga merupakan penjabaran tahunan dari Renstra BKPSDM Kota Salatiga, sehingga kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan dapat terjaga. Keterpaduan tersebut memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis BKPSDM dalam mendukung terwujudnya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan Sistem Merit.

Dalam konteks sinkronisasi pembangunan, Renja BKPSDM disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk Renja Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan urusan kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia aparatur serta Renja Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya. Sinkronisasi tersebut bertujuan menjaga keselarasan kebijakan, program, dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan.

Selanjutnya, Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, Renja BKPSDM tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai acuan penganggaran dan pengendalian kinerja perangkat daerah secara terintegrasi.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
20. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman bagi BKPSDM dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program serta kegiatan selama satu tahun anggaran secara terarah, terukur, dan akuntabel. Renja BKPSDM menjadi acuan operasional dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah pada urusan manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja tahun 2027 adalah :

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027 sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis BKPSDM Kota Salatiga.
- b. Mewujudkan keterpaduan dan keselarasan perencanaan program dan kegiatan BKPSDM dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027.
- c. Menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta bahan penyusunan RAPBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2027.
- d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM melalui perencanaan berbasis kinerja.
- e. Menjadi instrumen pengendalian, monitoring, dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Salatiga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi capaian kinerja bidang urusan tahun 2025
- 2.2 Evaluasi capaian SPM tahun 2023-2025
- 2.3 Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027
- 2.4 Telaah Pokok Pikiran DPRD
- 2.5 Usulan Masyarakat
- 2.6 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 2027
3.2	Arah Kebijakan Renja 2027
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
4.2	Rencana Kerja untuk Pencapaian program Prioritas Daerah, Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional dan Program Strategis Nasional
BAB V	Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan, yaitu IKU dan IKK tahun 2027
BAB VI	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja Bidang Urusan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pengembangan sumber daya manusia aparatur. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun perencanaan berikutnya. Selain itu, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan dalam menilai efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja BKPSDM Kota Salatiga secara berkelanjutan.

Realisasi capaian kinerja Bidang Urusan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025 yang diukur melalui IKU dan IKK disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi IKU BKPSDM Kota Salatiga tahun 2025

No	IKU	TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	IP ASN	80	82,14	102,67	IKU Renstra 2023-2026
2	Indeks Sistem Merit	0,66	0,66	100	IKU Renstra 2023-2026 dan Renstra 2025-2029
3	Persentase Kinerja ASN minimal Baik	NA	NA	-	IKU Renstra 2025-2029
4	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP	NA	NA	-	IKU Renstra 2025-2029
5	Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN	NA	NA	-	IKU Renstra 2025-2029

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan Tabel 2.1, capaian IKU BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan adanya masa transisi antara indikator kinerja yang digunakan pada Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan indikator yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun

2025-2029. Oleh karena itu, tabel di atas meyajikan indikator yang merupakan kelanjutan dari Renstra sebelumnya, sekaligus indikator baru yang mulai ditetapkan dalam Renstra periode 2025–2029.

Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan IKU yang digunakan pada Renstra BKPSDM Tahun 2023–2026 dan tidak lagi digunakan pada Renstra Tahun 2025–2029. Pada Tahun 2025, indikator tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan, dengan target sebesar 80 dan realisasi sebesar 82,14 atau mencapai 102,67 persen.

Sementara itu, Indeks Sistem Merit merupakan indikator yang tetap dipertahankan sebagai IKU pada Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029. Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 0,66 atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga telah sesuai dengan target kinerja yang direncanakan.

Adapun indikator Persentase Kinerja ASN Minimal Baik, Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP, dan Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN merupakan indikator baru yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Tahun 2025–2029. Pada Tahun 2025, ketiga indikator tersebut belum dapat diukur sehingga target dan realisasinya masih tercantum NA (*Not Available*). Pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pelaksanaan Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Tabel 2.2
Realisasi IKK BKPSDM Kota Salatiga tahun 2025

No	IKK	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74,44	76,33	102,53
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	25,19	25,21	100,07
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	99,47	99,72	100,25

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan Tabel 2.2, capaian IKK BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) terealisasi sebesar 76,33 dari target 74,44, dengan tingkat capaian 102,53 persen. Selanjutnya, Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mencapai realisasi 25,21 dari target 25,19, atau sebesar 100,07 persen. Adapun Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) terealisasi sebesar 99,72 dari target 99,47, sehingga tingkat capaiannya mencapai 100,25 persen.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia aparatur, khususnya dalam peningkatan tingkat pendidikan, pemenuhan jabatan fungsional, dan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional, telah dilaksanakan secara efektif sehingga seluruh indikator kinerja kunci dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

2.2. Evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023-2025

BKPSDM Kota Salatiga tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BKPSDM tidak memiliki indikator maupun target capaian SPM yang harus dipenuhi. Dengan demikian, evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 pada BKPSDM Kota Salatiga tidak dapat disajikan.

2.3. Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027

Rumusan permasalahan dan isu strategis BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 disusun berdasarkan Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029, RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025, serta dengan memperhatikan perkembangan kondisi lingkungan strategis yang dinamis. Rumusan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya perencanaan kebutuhan ASN yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan organisasi;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan manajemen ASN, termasuk pengembangan karier, promosi, mutasi, dan penerapan Manajemen Talenta;

- c. Belum optimalnya penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN sebagai instrumen dalam mendukung penerapan Manajemen Talenta, penyusunan profil kompetensi ASN, pengembangan karier, serta penempatan ASN secara tepat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- d. Belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi Asesor SDM Aparatur dalam mendukung penyelenggaraan penilaian kompetensi ASN secara profesional, objektif, dan akuntabel.
- e. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi, dan tuntutan pelayanan publik.
- f. Belum optimalnya pengelolaan kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
- g. Belum optimalnya pengelolaan data kepegawaian dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi selanjutnya dianalisis untuk menentukan isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan secara prioritas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027. Isu strategis sebagai berikut:

- a. Penguatan penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN;
- b. Optimalisasi pelaksanaan penilaian kompetensi ASN sebagai instrumen dalam mendukung penerapan Manajemen Talenta, penyusunan profil kompetensi ASN, pengembangan karier, serta penempatan ASN secara tepat berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- c. Penguatan kapasitas dan pengembangan SDM Asesor Aparatur;
- d. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN yang adaptif terhadap kebutuhan organisasi dan transformasi digital;
- e. Penguatan tata kelola data dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, dan berkualitas;
- f. Optimalisasi pengelolaan karier, kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.

2.4. Telaah Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat DPRD yang dihimpun berdasarkan hasil reses maupun aspirasi masyarakat sebagai

salah satu bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan hasil telaah terhadap Pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun 2027, tidak terdapat usulan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga. Oleh karena itu, BKPSDM Kota Salatiga tidak memiliki Pokok Pikiran DPRD yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2027.

2.5. Usulan Masyarakat

BKPSDM Kota Salatiga tidak mendapat usulan Program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2027 dari para Pemangku Kepentingan, baik usulan bersumber dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun dari pihak yang berkaitan dengan BKPSDM Kota Salatiga.

2.6. Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, BKPSDM Kota Salatiga berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai inovasi pelayanan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan inovasi akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi informasi, serta dinamika penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara.

Pada Tahun 2027, BKPSDM Kota Salatiga akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi pelayanan, baik melalui pengembangan sistem informasi, digitalisasi layanan administrasi kepegawaian, penyederhanaan proses bisnis, maupun peningkatan kualitas layanan kepada ASN dan masyarakat yang berkepentingan. Inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital.

Jenis dan bentuk inovasi pelayanan akan disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja, kebutuhan pengguna layanan, ketersediaan sumber daya, serta kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Dengan demikian, inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan BKPSDM Kota Salatiga sekaligus mendukung terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit.

Sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas, BKPSDM Kota Salatiga telah mengembangkan dan mengimplementasikan beberapa inovasi pelayanan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya. Keberadaan inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas pelayanan kepada ASN maupun masyarakat yang memperoleh layanan di bidang kepegawaian. Adapun inovasi yang telah dikembangkan dan diimplementasikan oleh BKPSDM Kota Salatiga antara lain sebagai berikut:

- a. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
- b. SI CUTE (Sistem Informasi Cuti Elektronik);
- c. SIPURNA SALATIGA (Sistem Informasi Pelayanan Purna Tugas ASN Salatiga);
- d. KOMPAS ASN (Konstruksi Model Penilaian Situasional Aparatur Sipil Negara);
- e. SI APEL (Aplikasi Presensi Apel).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027

Tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 utamanya merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut mengacu pada arah kebijakan serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 serta evaluasi capaian tujuan dan sasaran tahun 2025. Tujuan dan sasaran ini menjadi pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan sistem merit		Indeks Sistem Merit	0,68
2		Meningkatnya Kinerja ASN	Persentase Kinerja ASN minimal Baik	95,5
3		Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP	65
4		Terwujudnya Data ASN yang Andal dan Berkualitas	Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN	88

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025 sebagaimana diuraikan pada Bab II, target tujuan dan sasaran tahun 2027 tetap mengacu pada tahapan pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029 sebagai upaya menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja secara berkelanjutan

menuju terwujudnya Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027

Arah kebijakan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Perumusan arah kebijakan mengacu pada Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029, diselaraskan dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta memperhatikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara.

Penyusunan arah kebijakan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025, perkembangan kondisi lingkungan strategis, serta berbagai tantangan dalam pengelolaan manajemen ASN. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis sekaligus menjaga kesinambungan pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan penerapan Sistem Merit dalam seluruh aspek manajemen ASN, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, mutasi, serta pemberhentian ASN secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. Pengembangan Manajemen Talenta ASN melalui penyelenggaraan penilaian kompetensi, pemetaan potensi dan kompetensi (profiling ASN), serta penyusunan talent pool sebagai dasar pengembangan karier dan penempatan ASN sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- c. Peningkatan kualitas pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada kebutuhan organisasi, peningkatan profesionalisme ASN, serta mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Penguatan kapasitas kelembagaan penilaian kompetensi melalui pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan peningkatan jumlah

- Asesor SDM Aparatur dan tenaga pendukung teknis guna menjamin pelaksanaan asesmen yang objektif, profesional, dan sesuai standar;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, disiplin, dan pembinaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta berorientasi pada pelayanan;
 - f. Penguatan tata kelola data dan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan andal sebagai dasar penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan berbasis data;
 - g. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian melalui pengembangan inovasi pelayanan, digitalisasi proses bisnis, dan penyederhanaan mekanisme pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan pada urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur tetap selaras dengan sasaran Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029, mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta sejalan dengan kebijakan nasional di bidang manajemen ASN.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Penyusunannya mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, serta memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja, pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disusun diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rincian rumusan tersebut sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pendanaan tahun 2027

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			10.083.358.235
A	Urusan Kepegawaian			7.126.125.856
A.1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	6.661.071.356
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	87,65	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,99	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana	100	6.067.805.856
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43	5.760.189.722

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	307.616.134
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100	10.000.000
2.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100	198.265.500
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	5.000.000
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	5.000.000
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	30.000.000
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	11.000.000
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1.500.000
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	145.765.500
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100	50.000.000
4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	50.000.000

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100	111.000.000
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.000.000
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	110.000.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100	224.000.000
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	170.000.000
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	15.000.000
6.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	39.000.000
A.2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	77	465.054.500
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terlaksana	100	65.234.500
7.1	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	15.234.500

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
7.2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	50.000.000
8	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang terlaksana	100	140.460.00
8.1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	25.000.000
8.2	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	115.460.000
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang terlaksana	100	257.560.000
9.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1	257.560.000
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terlaksana	1	1.800.000
10.1	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1.800.000
B	Urusan Pendidikan dan Pelatihan		16	2.957.232.379
B.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	2.957.232.379
11	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase kegiatan pengembangan kompetensi teknis yang terlaksana	275	348.748.479

NO	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5
11.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	348.748.479
12	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang terlaksana	1	2.608.483.900
12.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	2.608.483.900

Sumber : BKPSDM Kota Salatiga 2026

Berdasarkan tabel tersebut, pelaksanaan urusan penunjang bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pada Tahun 2027 didukung oleh 3 program, 12 kegiatan, dan 23 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp10.083.358.235. Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029 serta mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

4.2. Rencana Kerja untuk Pencapaian program Prioritas Daerah, Kontribusi Terhadap Pencapaian Target Nasional dan Program Strategis Nasional

BKPSDM Kota Salatiga tidak memiliki program yang secara khusus ditetapkan sebagai Program Prioritas Daerah, Program Strategis Nasional (ProSN), maupun program yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah. Selain itu, tidak terdapat direktif khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan BKPSDM untuk diakomodasi dalam Rencana Kerja Tahun 2027.

Meskipun demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan BKPSDM Kota Salatiga tetap memberikan dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara yang profesional, berbasis sistem merit, serta peningkatan kompetensi ASN. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengelolaan kepegawaian, pengembangan kompetensi, penguatan manajemen talenta, peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN, serta pengembangan inovasi pelayanan kepegawaian yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan target kinerja Bidang Urusan BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 sebagai tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Penetapan target kinerja mengacu pada Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

Target kinerja yang disajikan meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga konsistensi pencapaian sasaran strategis perangkat daerah secara bertahap sesuai tahapan Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BKPSDM Kota Salatiga pada Tahun 2027. Berikut rinciannya :

Tabel 5.1
Target IKU BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,66	0,68
2	Persentase Kinerja ASN minimal Baik	%	NA	95,5
3	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP	%	NA	65
4	Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN	%	NA	88

Sumber : Renstra BKPSDM 2025-2029

Berdasarkan Tabel 5.1, target IKU BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025. Penetapan target tersebut dilakukan sebagai tahapan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dalam mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit.

Indikator Indeks Sistem Merit ditargetkan mencapai nilai 0,68 pada Tahun 2027, meningkat dari realisasi Tahun 2025 sebesar 0,66. Peningkatan

tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan BKPSDM dalam memperkuat penerapan sistem merit pada seluruh aspek manajemen ASN sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Sementara itu, indikator Persentase Kinerja ASN Minimal Baik, Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Minimal 20 JP, dan Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN merupakan indikator yang mulai diterapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 indikator-indikator tersebut belum memiliki data realisasi (NA).

Penetapan target tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi BKPSDM Kota Salatiga dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan secara terarah, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja ASN, pengembangan kompetensi ASN, serta terwujudnya data ASN yang andal dan berkualitas sesuai sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 5.2
Target IKK BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	2	3	4	5
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,33	74,44
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,21	25,19
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,72	99,47

Sumber : olah data 2026

Berdasarkan Tabel 5.2, target IKK BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 disusun mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025. IKK berfungsi sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur serta menjadi ukuran pencapaian kinerja perangkat daerah dalam mendukung sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi seluruh IKK pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, target Tahun 2027 tetap mengacu pada target dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025–2029, yaitu Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 74,44 persen, Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 25,19 persen, serta Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 99,47 persen.

Penetapan target tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan serta memastikan kesinambungan pencapaian sasaran pembangunan sesuai tahapan yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Capaian kinerja yang telah melampaui target pada Tahun 2025 menjadi modal yang baik bagi BKPSDM Kota Salatiga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VI PENUTUP

Renja BKPSDM Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari RENSTRA BKPSDM Kota Salatiga serta selaras dengan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.

A. Catatan Penting

Renstra Kota Salatiga BKPSDM dan RPJMD Kota Salatiga menjadi pedoman dalam penyusunan Renja, tetapi ada tahap dimana Perangkat Daerah harus melakukan analisis kebutuhan untuk tahun 2027 yang akan disesuaikan dalam penentuan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2027.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Renja BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh staf BKPSDM Kota Salatiga secara individu dan organisasi mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan dan mensukseskan Renja Tahun 2027 sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaannya;
3. Dalam pelaksanaan pada tahun 2027 dimungkinkan terjadi perubahan, baik dari evaluasi yang dilakukan BKPSDM sendiri ataupun dari pihak yang berkaitan seperti Bappeda, BPKPD dan Inspektorat. Perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam penyusunan Perubahan Renja BKPSDM 2027.

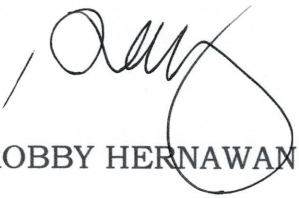
C. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, BKPSDM Kota Salatiga menentukan beberapa rencana tindak lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan harus berpedoman dengan aturan-aturan yang ada;
2. Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BKPSDM Kota Salatiga sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan dalam pelaksanaannya.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

LAMPIRAN

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA
TAHUN 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						8.656.874.335,00							9.050.039.134,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						8.656.874.335,00							9.050.039.134,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						7.108.125.856,00							7.350.039.134,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	6.658.305.856,00						-	6.718.039.134,00	
		[Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100 80.30 87.90	100 79.90 87.519	100 79.92 87.53	100 79.95 87.55	6.658.305.856,00	-	-	-	-	-	-	6.718.039.134,00	-
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	6.049.805.856,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	6.021.539.134,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	5.760.189.722,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		5.731.923.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	289.616.134,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		289.616.134,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	30.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	11.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			-				-	1.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		1.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	50.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	111.000.000,00			-	-	-	-	115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	-	-	-	-	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	110.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		110.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	185.000.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	215.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-	-			-	50.000.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian														
			-				-	50.000.000,00	-	-	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-	-			-	112.760.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	112.760.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-	-			-	285.260.000,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	330.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			-				-	257.560.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				25 Orang	25.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN														
			-				-	2.700.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	-			-	1.800.000,00			-	-	-	-	2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.548.748.479,00							1.700.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-			-	1.548.748.479,00						-	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatkan layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	19	0	0	15	1.548.748.479,00	-	-	-	-	-	-	1.700.000.000,00	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-			-	348.748.479,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				50 Orang	348.748.479,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

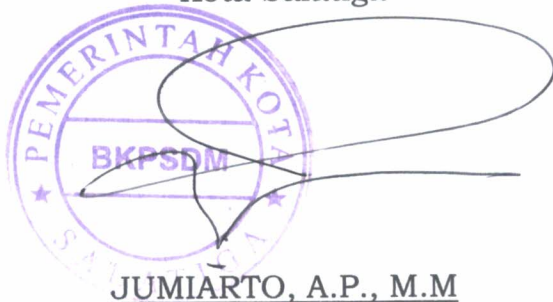
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2025	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-	-			-	1.200.000.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-	-	1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1.200.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningka tan Tata Kelola Pem erintahan B erintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas P embanguna n Daerah o. Meningk atkan kualitas kel embagaan dan penge mbangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat ;	-		1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	JUMLAH							8.656.874.335,00						9.050.039.134,00		

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan hasil sebagai berikut :

- Kesatu : sistematisa penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 14 Tahun 2026, paling sedikit memuat 6 (enam) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 6. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan rancangan Renja Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Renja Tahun 2027 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada RKPD di tetapkan.

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga



JUMIARTO, A.P., M.M

NIP. 19730511 199311 1 001

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Plh. Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



R.M. SURYO SAKTI H., S.Si., MH
NIP. 19750516 200112 1 001

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			Perlu dilengkapi dengan SK Tim dimaksud (sudah ditindak lanjuti)
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika RENJA 2027
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Salatiga

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renja PD Tahun 2027 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renja PD Tahun 2027, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	V		
I.3	Maksud dan tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renja PD	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renja PD	V		
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU					
II.1	Evaluasi Capaian Kinerja	Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025 (capaian tahun pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
II.2	Evaluasi Capaian SPM	Evaluasi capaian SPM Tahun 2023-2025 (bagi bidang urusan terkait)	V		
II.3	Permasalahan dan Isu Strategis	Rumusan permasalahan dan isu strategis tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis	V		
II.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	V		
II.5	Usulan Masyarakat	Telaah Usulan Masyarakat	V		Belum nampak di Bab II. Seandainya

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
					tidak adapun sebaiknya tetap dituangkan dalam Bab II (dengan diberikan catatan bahwa tidak ada usulan masyarakat). Lihat seperti pada “Pokok-pokok pikiran DPRD” (sudah ditindak lanjuti)
II.6	Inovasi	Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	V		
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH					
III.1	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang wajib sama dengan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penentuan target tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 membutuhkan analisa berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (target IKU/IKK dapat melebihi/berkurang dari target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)	V		
III.2	Arah Kebijakan	Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan kebijakan nasional/daerah lainnya	V		
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH					
IV.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, Renstra	V		

Sistematika		Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan		
			Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan
			Ada	Tidak	
		Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan, dan subkegiatan			
IV.2	Tematik	Dapat ditambahkan secara khusus rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah)	V		Apabila tidak ada, maka dapat tetap diberikan narasi (sudah ditindak lanjuti)
BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN					
V.1	Indikator Kinerja Utama PD	Target keberhasilan pencapaian yang didasarkan pada tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		
V.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	V		
BAB VI PENUTUP					
V	Penutup	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah	V		



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Pemuda Nomor 2 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325615
Faks (0298) 325615 Situs <http://bkpsdm.salatiga.go.id>
Surat elektronik bkpsdm@salatiga.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.6.5.1/2167

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA SALATIGA
TAHUN 2027

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Salatiga, maka perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Salatiga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun RENJA BKPSDM Kota Salatiga tahun 2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini bertugas:
- a. melakukan pengumpulan data pendukung penyusunan RENJA BKPSDM Kota Salatiga;
 - b. melakukan pembahasan penyusunan RENJA BKPSDM Kota Salatiga;
 - c. melakukan pengumpulan data dan pembahasan RENJA BKPSDM Kota Salatiga;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RENJA BKPSDM Kota Salatiga;
 - e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPSDM Kota Salatiga.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal : 7 November 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA,



JUMIARTO

Tembusan :

1. Wali Kota Salatiga (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala BPKPD Kota Salatiga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KOTA SALATIGA
NOMOR : 000.6.5.1/2167
TANGGAL : 7 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA TAHUN 2027

NO	JABATAN DALAM BADAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan	Penasehat
2.	Sekretaris Badan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan dan Mutasi	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	Anggota
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	Analisis Pengembangan Kompetensi Ahli Muda	Anggota
10.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
12.	Perencana Ahli Pertama	Anggota

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA SALATIGA,



JUMIARTO